



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. RATMININGSIH, M.M.

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala DPMPPA


PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,

Sekretaris DPMPPA


Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP 19670526 199303 2 008

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 1 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	20.762.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.767.072.000,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	3.650.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	207.455.000,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	270.268.000,00	APBD

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	621.750.000,00	APBD
	Jumlah	Rp	3.890.957.000,00	

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Sekretaris DPMPPA



Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP 19670526 199303 2 008



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA**


PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

**Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA**


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9, 24 persen	Formulasi : Jumlah akumulasi sub kegiatan yang responsif gender pada tahun- n / target seluruh sub kegiatan yang akan diresponsifkan gender (selama 5 tahun/ sampai dengan 2026)) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15, 01 persen	Formulasi : (Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / jumlah penduduk perempuan) x 100.000 Tipe capaian : Semakin rendah semakin baik Sumber data : DPMPPA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48, 15 persen	Formulasi : (Jumlah akumulasi kelurahan yang mengikuti evaluasi dekela / jumlah kelurahan yang ada) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA
4	Tercapainya Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	Formulasi : Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak yang ditangani / jumlah kasus kekerasan anak yang masuk ke LPPAR x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 14.960.000,00	APBD
2	Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.590.000,00	APBD
3	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 135.390.000,00	APBD
4	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.770.000,00	APBD

5	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	63.842.000,00	APBD
6	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Rp	215.615.000,00	APBD
7	Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.780.000,00	APBD
8	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp	42.483.000,00	APBD
9	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.632.000,00	APBD
Jumlah		Rp	514.062.000,00	

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA

ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020

5	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 63.842.000,00	APBD
6	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Rp 215.615.000,00	APBD
7	Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.780.000,00	APBD
8	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.483.000,00	APBD
9	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.632.000,00	APBD
Jumlah		Rp 514.062.000,00	

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Kabid PRPHAPPA

ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA**

PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes
NIP 19700502 199501 2 001

**Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat**

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Program :				
1	Tercapainya Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	83.33 persen	Formulasi : Jumlah kumulatif kelurahan yg difasilitasi pembangunan sarprasnya oleh TNI s.d thn n) / jumlah target kelurahan terfasilitasi (Selama periode renstra)) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Kelurahan dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88.89 persen	Formulasi : Jumlah Kelurahan dengan kriteria Cepat Berkembang Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97.75 persen	Formulasi : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu Kota, karang taruna kota) / jumlah LKK (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu kota, karang taruna kota yang ada) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Rp 557.400.000,00	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 32.528.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 746.116.000,00	APBD
Jumlah		Rp 1.336.044.000,00	

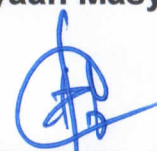
Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat



ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASEHAH, S.H.

Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan DPMPPA Kota
Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. RATMININGSIH, M.M.

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

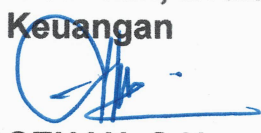
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA**


Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP 19670526 199303 2 008

**Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan**


FASEHAH, S.H.
NIP 197702081996030 2 002

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + Persentase capaian sub keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD + Persentase capaian sub keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keg. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keg Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	Formulasi : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.204.000,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.558.000,00	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.000.000,00	APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.726.098.000,00	APBD
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 39.530.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.444.000,00	APBD
Jumlah		Rp 2.787.834.000,00	

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA



Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP 19670526 199303 2 008

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



FASEHAH, S.H.
NIP 19770208 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. RATMININGSIH, M.M.

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA

Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP. 19670526 199303 2 008

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor + persentase capaian sub keg. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor + persentase capaian sub keg. Penyediaan peralatan rumah tangga + Persentase capaian sub keg. penyediaan bahan logistik kantor + Persentase capaian sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan + Persentase capaian sub keg. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan + Persentase capaian sub keg. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dibagi 7 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KNERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Formulasi : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KNERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KNERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
8	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
9	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KNERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	Formulasi : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Formulasi : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
14	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 3.650.000	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.710.000	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 44.952.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.050.000	APBD
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 38.244.000	APBD
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.380.000	APBD
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.530.000	APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 113.589.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.520.000	APBD

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 107.400.000	APBD
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 160.348.000	APBD
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 71.960.000	APBD
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 535.300.000	APBD
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 14.490.000	APBD

Jumlah

Rp

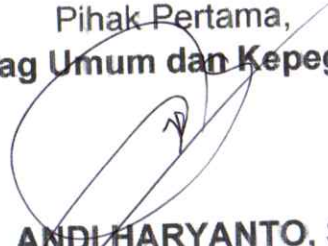
1.103.123.000

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA


Ir. RATMININGSIH, M.M.
NIP. 19670526 199303 2 008

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH AYU ERMAWATI, S.KM

Jabatan : Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.KM, M.Kes

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA
KOTA PEKALONGAN



PUJI WINARTI, S.KM, M.Kes
NIP. 197005021995012001

Pihak Pertama,
Kepala UPTD PPA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN



DYAH AYU ERMAWATI, SKM
NIP. 196909021992032011

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 persen	Formulasi : (Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani/ jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke UPTD PPA) x 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
2	Tercapainya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ kota	100 persen	Formulasi : (Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani/ jumlah kasus kekerasan pada anak yang masuk UPTD PPA) x 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
Sub Kegiatan				
1	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten. Kota	24 Layanan	Formulasi : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	24 Layanan	Formulasi :Jumlah AMPK yangmendapat layanan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Anggaran
Rp 63.842.000,00
Rp 42.483.000,00

Keterangan
APBD
APBD

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala DPMPPA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



Pihak Pertama,

Kepala UPTD PPA

DPMPPA KOTA PEKALONGAN

DYAH AYU ERMAWATI, S.K.M
NIP. 196909021992032011



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDAYANI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang P3HAP2A DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3HAP2A
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020

**Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dibagi target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dibagi target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase forum anak yang aktif	100 persen	Formulasi : (Jumlah forum anak yang aktif / jumlah forum anak se kota Pekalongan) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	3 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Terlayannya SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	27 Orang	Formulasi : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Terlaksananya kegiatan pencegahan KtA terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang P3HAP2A

DPMPPA KOTA PEKALONGAN


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda


DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIA PARAMITA, SE, M.M.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kabid P3HAPPA DPMPPA**


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

**Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda**


NADIA PARAMITA, SE, M.M.
NIP 19801214 201101 2 004

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	100 persen	Formulasi : Jumlah sub kegiatan yang responsif gender pada tahun -n / target sub kegiatan yang akan diresponsifkan gender s.d tahun 2026 (372 sub kegiatan, 2 sub kegiatan/OPD/tahun)x100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	100 persen	Formulasi : (Jumlah organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan yang dilatih / jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan) x100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100 persen	Formulasi : Jumlah DWP yang melaksanakan kegiatan / Jumlah seluruh Dharma Wanita yang ada x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
4	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus	100 persen	Formulasi : Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Sasaran Sub Kegiatan :

1	Tersusunnya Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
---	---	--	-----------	--

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersusunnya Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Terlayannya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapat advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	Formulasi : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kabid P3HAPPA



ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Analisis Kebijakan Ahli Muda



NADIA PARAMITA, SE, M.M.
NIP 19801214 201101 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIKA SAFITRI, SH**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENI PURWANTI, S.STP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPMPPA
KOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Kelembagaan
Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat,**

ENI PURWANTI, S. STP.

NIP. 198608042004122002

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

RIKA SAFITRI, SH

NIP. 196701131993032006

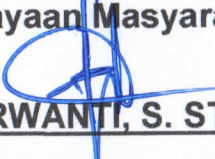
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	Formulasi : Jumlah dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota terdiri dari 4 dokumen Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA, Kelurahan

Pekalongan, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat,


ENI PURWANTI, S. STP.

NIP. 198608042004122002

Analisis Kebijakan Ahli Muda,


RIKA SAFITRI, SH

NIP. 196701131993032006



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, S.E

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPPA Kota Pekalongan

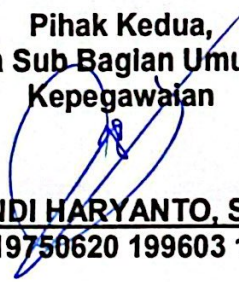
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


ANDI HARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

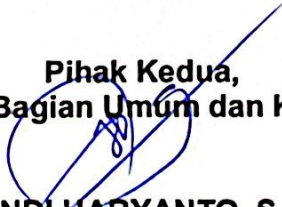

ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya bahan-bahan kerja yang berkaitan dengan bidang kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah laporan kepegawaian yang tercipta	1 Laporan
2	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, pensiun, presensi, cuti, dan penghargaan secara cepat dan tepat.	Jumlah laporan administrasi yang tersusun	1 Laporan
3	Terlaksananya koordinasi dengan unit kerja instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah koordinasi yang terlaksana	12 Kali
4	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang tersusun	1 Laporan

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


ANDHARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI LESTARI S.E.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan**

DESI LESTARI S.E.
NIP 19891212 202012 2 013

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

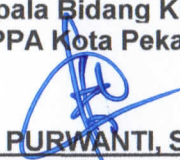
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 persen	Formulasi : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi (LPM, BKM, PKK) dibagi jumlah LKK (LPM, BKM, PKK) yang ada dikali 100 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (2020) terdiri dari : 1. LPM (27) 2. BKM (27) 3. PKK (32), Pokjanal Posyandu Kota (1), Karang Taruna Kota (1) jumlah 88 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

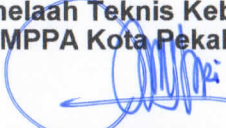
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Tertingkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
3	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


DESI LESTARI S.E.
NIP 19891212 202012 2 013



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DYAH NASTITI, S.Sos**

Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENDAH WULANDARI, S.Psi**

Jabatan : **Kepala Bidang PP, PHA dan PPA DPMPPA Kota Pekalongan**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA**

ENDAH WULANDARI, S.Psi

NIP. 19800512 200512 2 020

**Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan**

DYAH NASTITI, S.Sos

NIP. 19940923 202203 2 013

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja: (NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teradvokasinya Kebijakan dan terdampungnya kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga
2	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

Pekalongan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA

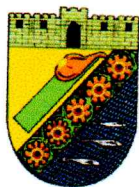


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 19800512 200512 2 020

Pihak Pertama,
Analisis Perlindungan Perempuan



DYAH NASTITI, S.Sos
NIP. 19940923 202203 2 013



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHARISMA EMA FATMA, S.Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang
2.	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan



ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan



KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak kedua

KEPALA BIDANG KMPM

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama

ANALIS KEMASYARAKATAN

ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi.
NIP 19950430 202203 2 018

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100 persen	Formulasi : Jumlah kelurahan yang tertib administrasi / jumlah kelurahan keseluruhan) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPP
DPMPPA Kota Pekalongan

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan

ENI PURWANTI, S.SIP
NIP 19860804 200412 2 002

ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi
NIP 19950430 202203 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA RIZA PRATIWI, S.E.

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP

NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan**

WINDA RIZA PRATIWI, S.E.

NIPPPK 19910102 202421 2 008

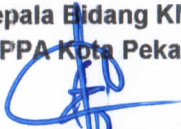
PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

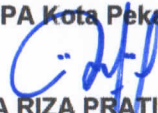
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	11,11 persen	Formulasi : (jumlah kelurahan yg difasilitasi pembangunan sarprasnya / jumlah kelurahan kumuh (yg ada sesuai SK)) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan


WINDA RIZA PRATIWI, S.E.
NIPPPK 19910102 202421 2 008



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZAM SLAMET

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
DPMPPA

ANDI HARYANTO, SE

NIP.19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

AZAM SLAMET

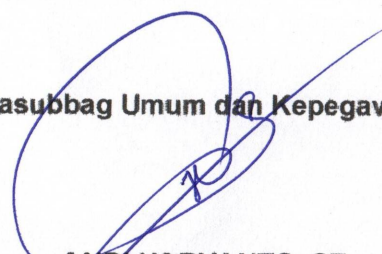
NIP.19830529 200901 1 009

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

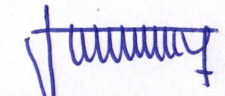
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kotor	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	12 Bulan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan
4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	16 Dokumen
5	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA


ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pengadministrasi Perkantoran


AZAM SLAMET
NIP. 19830529 200901 1 009



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROMADHON

Jabatan : Operator Layanan Oprasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA

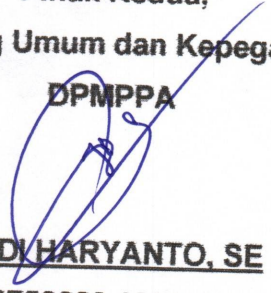
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
DPMPPA


ANDI HARYANTO, SE
NIP.19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


ROMADHON
NIP.19750514 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemelihara kendaraan dinas	Jumlah hari pemeliharaan kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan mengemudi kendaraan dinas	Jumlah kegiatan mengemudi kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
3	Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu	Jumlah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	12 Bulan

Pekalongan, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
**Kasubag Umum
dan Kepegawaian
DPMPPA Kota Pekalongan**

ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama
**Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan**

ROMADHON
NIP 19750514 200701 1 009